BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan, dan menghapus status hukum keduanya sebagai pasangan serta menghentikan kehidupan bersama dalam satu rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai perpisahan, putusannya hubungan suami istri, atau berakhirnya ikatan perkawinan.¹¹ Perceraian bukan sekadar kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak boleh didasarkan hanya pada persetujuan bersama. Sebaliknya, perceraian merupakan langkah terakhir yang dapat diambil ketika konflik dalam pernikahan tidak lagi dapat diselesaikan. Dalam pandangan Kristiani, perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan yang sejatinya dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup. Idealnya, pernikahan adalah sebuah komitmen suci yang tidak boleh dipisahkan, namun dalam beberapa situasi, pasangan suami istri mungkin merasa bahwa melanjutkan kehidupan bersama tidak lagi memungkinkan.¹²

Meskipun pernikahan dipandang sebagai lembaga yang sakral dan memiliki tujuan luhur, realitas menunjukkan bahwa banyak orang mulai mengabaikan nilai-nilai pernikahan dengan berbagai alasan. Dalam tulisan

¹¹Dora Amalia, "KBBI: Perceraian," last modified 2024, <https://kbbi.web.id/perceraian>.

¹²Bernat Sitorus and Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk, "Perceraian Dalam Pandangan Kristen," *Majalah Ilmiah Methoda* 12, no. 1 (2022): 25–28.

Andreas Danang Rusmiyanto menyatakan bahwa, beberapa tahun yang lalu, Garry Collin mengungkapkan bahwa konsep pernikahan mengalami perubahan yang signifikan, yang pada akhirnya mengguncang banyak pihak. Ia mengutip pemikiran Alvin Toffler, yang menyatakan bahwa dalam era perubahan sosial yang cepat, atau yang dikenal sebagai "*future shock*", model pernikahan tradisional semakin kehilangan kemampuannya untuk memenuhi harapan akan cinta dan komitmen seumur hidup di tengah dinamika kehidupan modern. Dalam konteks perubahan tersebut, semakin banyak pasangan yang mencoba berbagai bentuk hubungan alternatif, seperti pernikahan percobaan, hidup bersama tanpa ikatan resmi, hingga hubungan sesama jenis yang diklaim sebagai bentuk "pernikahan" baru.¹³ Perceraian, yang dahulu dipandang sebagai sesuatu yang tabu dan ditolak oleh masyarakat, kini semakin diterima, bahkan dalam lingkungan gereja sekalipun. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pernikahan yang dulu dijunjung tinggi kini mengalami pergeseran yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap institusi pernikahan.

¹³Andreas Danang Rusmiyanto, "Fenomena Perceraian Yang Terjadi Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI: Sebuah Kajian Teologis," *Ritornera Jurnal Pentakosta Indonesia* 3, no. 1 (2023): 56–57.

Ada dua pandangan mengenai perceraian, yaitu:

1. Perceraian menurut Alkitab

Dalam Perjanjian Lama perceraian tidak dikehendaki, tetapi kenyataannya, perceraian tetap terjadi dan bahkan terdapat aturan yang secara jelas membahas hal tersebut, sebagaimana tercantum dalam Ulangan 24:1-4. Dalam teks-teks lain seperti Ulangan 22:19, 28-29 dan Imamat 22:13 (lihat juga Hosea 3:1-3; Maleakhi 2:13-16; Yeremia 3:1,8; Yesaya 50:1), tampak bahwa praktik cerai telah ada di tengah masyarakat Israel pada masa itu. Praktik ini kerap menimbulkan penderitaan bagi perempuan yang diceraikan. Oleh karena itu, Musa menetapkan ketentuan dalam Ulangan 24:1-4 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam situasi tersebut.¹⁴

Peraturan dalam Ulangan 24:1-4 yang diberikan oleh Musa bukanlah bentuk pengesahan atas perceraian, melainkan upaya untuk membatasi dampak negatif dari perilaku suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Musa tidak sedang melegalkan perceraian, melainkan melarang seorang laki-laki untuk menikahi kembali mantan istrinya apabila perempuan tersebut sudah menjadi istri orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perceraian sudah terjadi, dan Musa

¹⁴Surip Stanislaus, "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama," *Jurnal Filsafat-Teologi* 14, no. 2 (2017), hlm 33.

menetapkan aturan ini sebagai langkah formal demi memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dari perlakuan tidak adil. Dengan mempertimbangkan penderitaan perempuan yang dicerai, Musa pun memerintahkan agar diberikan surat cerai sebagai bentuk kepedulian. Maka dari itu, dalam Matius 19:8, Yesus menegaskan bahwa: "Karena ketegaran hatimulah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian."¹⁵ Ini berarti bahwa izin tersebut muncul bukan karena perceraian dibenarkan, melainkan karena dorongan kuat dari para laki-laki Israel yang telah berbuat dosa dan terbiasa dengan perilaku menyimpang.¹⁶ Musa tidak menyetujui kesalahan mereka, namun memberikan ketentuan itu sebagai upaya membatasi kerusakan moral dan melindungi perempuan dari konsekuensi buruk akibat perceraian.

Dalam Perjanjian Baru sangat melarang praktik perceraian seperti yang terdapat di Matius 19:6 menyatakan, "*Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.*" Ayat ini menegaskan bahwa dalam iman Kristiani, pernikahan adalah ikatan suci yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai perjanjian seumur hidup. Pernikahan bukanlah sekadar kesepakatan manusia, melainkan hasil dari inisiatif ilahi, di mana Allah

¹⁵Lih, *Matius 19:8* (LAI:TB).

¹⁶Stanislaus, "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama", hlm.34

sendiri yang berperan dalam menyatukan pasangan melalui otoritas-Nya. Lembaga gereja menjadi alat Tuhan dalam meneguhkan pernikahan, sehingga pernikahan bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, melainkan harus dipertahankan hingga maut memisahkan.¹⁷

Ketika perceraian terjadi, hal itu bukan sekadar pemutusan hubungan antara pasangan, tetapi juga cara untuk melanggar kehendak Tuhan. Perceraian mencederai anugerah Tuhan yang telah menyatukan dua insan dalam sebuah perjanjian kudus. Dalam pandangan iman Kristiani, perceraian bertentangan dengan tujuan hidup orang percaya, karena melanggar ketetapan Tuhan dan dianggap sebagai suatu dosa. Yesus sendiri dengan tegas menegaskan larangan perceraian dalam Matius 19:4-6, "*Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia.*"¹⁸ Jika ditafsirkan perceraian dalam kekristianian adalah berakhirnya ikatan pernikahan yang semestinya berlangsung seumur hidup. Namun, dampak dari perceraian tidak hanya terbatas

¹⁷Wendy Sepmady Hutahaean, *Kepemimpinan Keluarga Kristian* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm 52.

¹⁸Lih, *Matius 19:4-6* (LAI:TB).

pada pasangan yang berpisah, melainkan juga mempengaruhi berbagai aspek lainnya, seperti anak-anak, pembagian harta benda, peran gereja, tatanan sosial, dan hubungan manusia dengan Allah. Setiap pihak yang terlibat dalam pernikahan juga akan merasakan konsekuensi dari perceraian tersebut.¹⁹

Seperti pernikahan kembali setelah perceraian tetap tidak sah secara rohani, meskipun secara hukum negara diperbolehkan. Seseorang yang menikah lagi setelah perceraian dianggap masih terikat dalam pernikahan pertamanya, karena pasangan sebelumnya masih hidup. Oleh sebab itu, hubungan pernikahan yang baru dianggap tidak layak di mata Tuhan dan gereja. Dalam ajaran Kristiani, gereja tidak akan pernah memberikan peneguhan terhadap pernikahan kedua bagi seseorang yang telah bercerai. Komitmen pernikahan pertama harus tetap dihormati, karena di dalam iman Kristiani, pernikahan merupakan janji suci yang hanya dapat dipisahkan oleh maut.²⁰

Dalam Perjanjian Baru, Yesus dengan tegas menyatakan pandangannya mengenai perceraian, yang dapat ditemukan dalam Matius 19:9 dan Matius 5:31-32. Yesus berkata dalam dua ayat ini secara eksplisit menolak perceraian sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Namun, ada satu pengecualian yang disebutkan, yaitu

¹⁹Hutahaean, *Kepemimpinan Keluarga Kristen*. hlm.53.

²⁰H. Berkhof, I. H. Enklaar, *Sejarah Gereja* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2016), hlm 134.

kasus perzinahan. Dalam teks asli bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk perzinahan adalah *porneia*. Kata ini memiliki makna yang luas dan sering dikaitkan dengan segala bentuk kenajisan seksual. Menariknya, Yesus tidak memberikan batasan yang ketat mengenai arti *porneia*, apakah hanya terbatas pada hubungan fisik di luar pernikahan atau mencakup aspek yang lebih luas dalam kehidupan seseorang.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Kristus, kesucian dan kesetiaan dalam pernikahan adalah hal yang sangat penting, sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai sesuatu yang serius di hadapan Allah.

2. Perceraian Menurut Hukum Negara

Di Indonesia, perceraian diatur melalui hukum negara dengan sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, khususnya Pasal 144. Regulasi ini menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dijalankan sesuai dengan alasan yang sah dan harus melalui proses peradilan. Perkara ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara sembarangan tetapi harus memperhatikan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.²²

²¹Hutahaean, *Kepemimpinan Keluarga Kristiani*, hlm 54.

²²Cindy Ayu Trisnawati, "Perceraian: Perspektif Agama Dan Hukum Negara" (Kompasiana, 2025), last modified 2025, <https://www.kompasiana.com/cindyayutrisnawati3220230411528/67a3934034777c782c106ff4/perceraian-perspektif-agama-dan-hukum-negara>.

Sebagaimana yang di ketahui bahwa hukum perceraian termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Jika ditinjau dalam konteks yang lebih luas, hukum perceraian juga merupakan bagian dari hukum perdata. Hal ini dikarenakan undang-undang perceraian berakar pada hukum perkawinan, yang pada dasarnya termasuk dalam lingkup hukum perdata. Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam tulisan Muhammad Sayfuddin, tentang Hukum Perceraian. Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum perkawinan merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tindakan hukum dan hasil-hasilnya antara dua orang seorang pria dan seorang wanita yang memutuskan untuk hidup bersama dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagian besar ketentuan yang mengatur hubungan antara suami dan istri berlandaskan pada norma-norma agama, etika, serta adat kesopanan yang berlaku dalam masyarakat.²³

Seperti yang terdapat dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan ketika ada alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, seperti:²⁴

²³Muhammad Sayfuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 1.

²⁴Wina Sasmita, "Analisis Hukum Islam Tentang Cerai Gugat Hukum Adat Dayak Iban Di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang" (IAIN Walisongo, 2016), hlm 8-9.

- a) Salah satu pasangan terbukti melakukan perzinahan atau memiliki kebiasaan buruk seperti kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, dan perilaku destruktif lainnya yang tidak dapat disembuhkan.
- b) Jika diantara mereka meninggalkan pasangannya secara terus-menerus selama dua tahun tanpa memberikan izin maupun penjelasan yang dapat diterima secara hukum, atau disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya.
- c) Sanksi pidana bagi salah satu mitra termasuk hukuman penjara minimal lima tahun dan hal tersebut terjadi setelah pernikahan berlangsung.
- d) Terjadi tindakan kekerasan fisik atau psikis yang serius, yang mengancam keselamatan atau kesehatan pasangan dalam kehidupan rumah tangga.
- e) Jika diantara mereka mengalami gangguan fisik atau menderita penyakit kronis hingga tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.
- f) Ketegangan dalam hubungan rumah tangga berupa perselisihan yang terus-menerus dan tak kunjung terselesaikan, hingga membuat kehidupan bersama tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan secara harmonis.
- g) Suami melanggar isi taklik talak yang pernah dijanjikan dalam perjanjian pernikahan yang sah menurut hukum.

- h) Salah satu dari pasangan memutuskan untuk pindah agama atau keluar dari keyakinan yang dianut saat menikah, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan dan keselarasan dalam keluarga.

B. Teologi Feminis

Abad ke-20 menyaksikan munculnya teologi feminis, khususnya di Amerika Utara pada akhir tahun 1960-an. Gerakan ini mulai terbentuk sebagai respons terhadap keinginan banyak perempuan untuk memperoleh kesetaraan peran dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keagamaan.²⁵ Menurut Paul Pocter, sebagaimana dikutip oleh Aya Susanti dalam *Cambridge International Dictionary of English*, teologi feminis dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa perempuan harus diberikan hak, wewenang, serta peluang yang setara dengan laki-laki, dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.²⁶

Teologi feminis muncul sebagai reaksi terhadap sistem patriarkat yang selama ini dianggap menindas kaum perempuan. Para feminis berpendapat bahwa Alkitab seringkali dipandang dengan kaca mata patriarkal karena ditulis dan disusun oleh kaum Adam yang pada masa budaya patriarki, sehingga mereka memiliki pandangan kritis terhadapnya. Dalam ranah

²⁵Youke L. Singal, "Paradigma 'Teologi Feminis' Yang Tidak Relevan Dengan Ketetapan Tuhan: Suatu Respon Empiris Dari Perspektif Injili," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2 3, no. 2 (2022): 107.

²⁶Aya Susanti, *Feminis Radikal: Studi Kritis Alkitabiah* (Bandung: Kalam Hidup, 2008), hlm 11-12.

keagamaan, teologi feminis tetap mengakui bahwa Alkitab memiliki otoritas sebagai firman yang diinspirasi oleh Allah. Namun, karena ditulis oleh manusia yang memiliki keterbatasan, ada kemungkinan perbedaan antara firman Allah dengan bahasa atau ungkapan yang digunakan oleh para penulisnya. Kaum feminis melihat adanya ketidak konsistenan dalam Alkitab mengenai peran perempuan. Beberapa bagian menempatkan perempuan setara atau bahkan lebih tinggi dibanding laki-laki, sementara bagian lain justru menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Teologi feminis menekankan bahwa pendekatan patriarkal tidak boleh mendominasi dalam membaca teks-teks Alkitab. Sebaliknya, diperlukan cara pandang yang lebih inklusif agar pesan pembebasan bagi perempuan dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, pemahaman Alkitab harus mempertimbangkan pengalaman nyata yang dialami oleh perempuan dalam berbagai konteks kehidupan mereka.²⁷

Oleh karena itu, teologi feminis lahir sebagai respons terhadap penindasan yang dialami perempuan. Teologi ini merupakan refleksi kritis terhadap praktik sosial yang ada. Dalam konteks Indonesia saat ini, yang dikenal sebagai dekade perjuangan perempuan, tantangan terbesar adalah membangun kolaborasi antara laki-laki dan perempuan agar keduanya dapat berkontribusi secara bermakna tanpa merendahkan nilai serta martabat salah satu pihak. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan berpikir,

²⁷Eka Kristining Rahayu, "Tinjauan Teologis Terhadap Budaya Patriarkal Di Indonesia," *Pengarah: Jurnal Teologi Kristiani* 1, no. 2 (2019): 116.

merancang konsep, dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata dengan bimbingan kebijaksanaan ilahi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan harkat dan martabat perempuan yang mungkin telah terdistorsi oleh sistem sosial yang ada. Dengan demikian, perempuan dapat berperan sejajar dengan laki-laki tanpa mengabaikan kodrat serta peran istimewa yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka.²⁸ Demikian juga respon salah satu tokoh teologi feminis mengenai kesenjangan yang sering membuat perempuan berada dalam tekanan para laki-laki yaitu Letty M. Russell.

Letty menjabat sebagai profesor dalam bidang teologi praktis di Yale Divinity School dan menerima penahbisan sebagai pendeta oleh Gereja Presbiterian di Amerika Serikat pada tahun 1958. Selain itu, ia juga mengabdikan diri selama tujuh belas tahun sebagai pelayan jemaat sekaligus pengajar di East Harlem Protestant Parish. Dalam bukunya mengenai teologi pembebasan dengan perspektif feminis, menggambarkan penggabungan Feminisme dengan teologi demi mengembangkan hermeneutik teologi yang feminis.²⁹

Dalam karyanya yang lebih baru, *Rumah Tangga Kebebasan dan Gereja dalam Putaran "Household of Freedom dan Church in the Round"*, Russell semakin memperjelas definisinya tentang feminisme. Ia menjelaskan bahwa

²⁸Aya Susanti, *Feminis Radikal: Studi Kritis Alkitabiah*, (Bandung: Kalam Hidup, 2008), hlm 31.

²⁹Ibid, hlm 31.

feminisme, seperti istilah lain yang berakhiran "*isme*," menunjukkan suatu bentuk advokasi. Menurutnya, feminisme adalah perjuangan bagi hak-hak perempuan yang bertujuan untuk mencapai kebebasan mereka. Oleh karena itu, feminisme bukanlah gerakan yang menentang laki-laki atau hanya mendukung perempuan secara sepihak, melainkan suatu gerakan yang memungkinkan perempuan dan laki-laki bekerja bersama demi keadilan gender.³⁰

Dari sudut pandangya sebagai seorang teolog feminis, Russell menegaskan bahwa feminisme adalah perjuangan melawan segala bentuk dehumanisasi. Ia menggarisbawahi bahwa feminisme membela integritas martabat manusia untuk semua orang, tanpa memandang usia, kemampuan, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, atau kelas sosial. Dengan demikian, menurutnya, laki-laki juga dapat menjadi bagian dari gerakan feminis asalkan mereka bersedia mengadvokasi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dalam *Church in the Round*, Russell menggaris bawahi bahwa feminisme adalah sebuah "*kerangka pemikiran*" yang bertujuan untuk menentang dan menghapus ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Ia menyatakan bahwa feminisme merupakan konsep modern, sebuah ideologi yang dirancang untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, Russell tidak hanya melihat feminisme sebagai konsep

³⁰Zohreh Abdekhodaie, "Letty M. Russell: Insights and Challenges of Christian Feminism" (University of Waterloo, 2008), hlm 33-34.

teoritis, tetapi juga sebagai dorongan untuk bertindak dan menciptakan perubahan sosial. Ia mengadopsi prinsip-prinsip teologi pembebasan yang berorientasi pada tindakan nyata menuju kesetaraan. Sebagai seorang teolog Kristiani, ia menekankan bahwa salah satu ajaran utama Yesus adalah membawa semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan ke dalam kesetaraan dalam "rumah tangga Allah." Gagasan ini kemudian menjadi dasar bagi pemikirannya tentang iman dalam teologi feminisnya.³¹

Dalam tulisan Queency, Russel menyatakan bahawa Alkitab dipahami sebagai firman yang membebaskan (*liberating word*). Konsep tersebut dapat dipahami dengan jelas saat kisah Alkitab tentang Keluaran, yang bertahan hingga era kenabian, sampai masa pelayanan Yesus Kristus. Kisah eksodus dalam Kitab Suci menggambarkan bagaimana Allah bertindak sebagai pembebas bagi bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Demikian halnya, berita yang disampaikan oleh para nabi kerap menyoroti tema pembebasan dari berbagai bentuk kekerasan. Yesaya 61:1-2 menggambarkan hal ini, dan Yesus mengulanginya dalam Lukas 4:18. "Pada hari ini genaplah nas ini, apabila kamu mendengarnya," kata Yesus dalam Lukas 4:21, menunjukkan bahwa misi penyelamatan Allah masih terus berlanjut melalui pelayanan-Nya di tengah dunia. Russell tidak hanya menyebut Alkitab sebagai *the liberating word* (firman yang membebaskan), tetapi juga menegaskan bahwa Alkitab

³¹Ibid, hlm 35-37.

harus menjadi *the liberated word* (firman yang merdeka). Konsep *the liberated word* yang dimaksud oleh Russell merujuk pada perlunya membebaskan Alkitab dari perspektif patriarkal. Ia berpendapat bahwa cara pandang yang membelenggu teks-teks Kitab Suci harus dihilangkan agar pesan pembebasan bagi kaum perempuan dapat ditemukan dengan lebih jelas. Teologi pembebasan feminis berakar pada konsep kebebasan (*freedom*), meskipun dalam praktiknya, makna *freedom* sendiri seringkali memiliki interpretasi yang beragam di kalangan feminis. Letty M. Russell mengembangkan pemikirannya berdasarkan Roma 8:22-23, yang menggambarkan ciptaan sedang mengerang, menantikan saat pembebasan yang sesungguhnya. Selain itu, ia memaknai kisah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir sebagai kerangka teologis bagi perjuangan perempuan dalam melepaskan diri dari penindasan patriarkal yang dilakukan oleh laki-laki. Menurut Letty M. Russell dalam tulisan Queency, tujuan tertinggi dari gerakan feminis adalah mewujudkan kemanusiaan yang baru, yang ia sebut sebagai *the final and ultimate goal of liberation*, yaitu realisasi dari tatanan kehidupan yang lebih adil dan setara. Teologi feminis membawa ide segar untuk menggantikan sistem yang sudah ketinggalan zaman dan membawa perubahan di dunia dan masyarakat dengan yang lebih inklusif dan membebaskan.³²

³²Queency Christie Wauran, "Teologi Feminis Kristen," *ResearchGate*, last modified 2016, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52067067/Teologi_Feminis_Kristen_-libre.pdf?1488943920=&response-content.

Bahasa yang androsentrik serta penggunaan citra patriarkal adalah sebuah bentuk, bukan inti pesan Alkitab. Karena Kristus adalah tema utama tradisi tersebut, teologi feminis harus menekankan bahwa pekerjaan Kristus melibatkan menjadi manusia baru, bukan menjadi manusia pertama.³³

Jika dikaitkan dengan permasalahan perceraian dalam teologi feminis, pemikiran Russell memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana ketidaksetaraan gender sering kali menjadi penyebab utama dalam pernikahan yang gagal. Dalam berbagai tradisi keagamaan, termasuk Kekristianan, perempuan kerap kali ditempatkan pada posisi yang lebih rentan dalam hubungan pernikahan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Dominasi teologi patriarkal seringkali mengharuskan perempuan untuk tetap bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat, bahkan ketika mereka mengalami ketidakadilan dan kekerasan. Menurut perspektif Russell, teologi feminis menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep pernikahan agar lebih mencerminkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Pernikahan seharusnya tidak menjadi sarana penindasan, tetapi justru menjadi bentuk kemitraan yang sejajar antara suami dan istri, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus tentang kesetaraan. Oleh karena itu, jika suatu pernikahan justru menciptakan ketidakadilan, eksploitasi, atau bahkan kekerasan, maka perceraian dapat dianggap sebagai bentuk pembebasan bagi

³³Aya Susanti, *Feminis Radikal: Studi Kritis Alkitabiah* (Bandung: Kalam Hidup, 2008), hlm 32.

perempuan yang tertindas, bukan sebagai kegagalan moral maupun spiritual. Dalam tulisan Zohreh Abdekhodaie, Russell menggaris bawahi bahwa gereja memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam pernikahan. Gereja seharusnya tidak menjadi institusi yang memperkuat sistem patriarki yang merugikan perempuan, melainkan menjadi tempat yang menyediakan pemulihan, dukungan, dan kesempatan baru bagi mereka yang memilih untuk keluar dari pernikahan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, gereja tidak boleh memandang perceraian sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif, tetapi harus melihatnya sebagai jalan menuju keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang terjebak dalam relasi yang menindas.³⁴

Secara keseluruhan, gagasan Russell tentang teologi feminis memberikan dasar yang kuat untuk memahami perceraian sebagai bagian dari perjuangan menuju keadilan gender, baik dalam gereja maupun masyarakat. Dengan menjadikan kesetaraan dan keadilan sebagai prinsip utama dalam hubungan pernikahan, teologi feminis menghadirkan perspektif yang lebih membebaskan dan humanis. Dalam pemikiran ini, perempuan tidak lagi dipaksa untuk bertahan dalam pernikahan yang menindas, tetapi

³⁴Abdekhodaie, "Letty M. Russell: Insights and Challenges of Christian Feminism. hlm 34-36"

memiliki hak dan kebebasan untuk mencari kehidupan yang lebih bermartabat sesuai dengan kehendak Tuhan.³⁵

C. Perceraian Dalam Perspektif Teologi Feminis

Dalam teologi feminis, perceraian dianggap sebagai isu yang kompleks karena berkaitan erat dengan pengalaman perempuan dalam institusi pernikahan yang sering kali tidak lepas dari ketimpangan gender. Teologi feminis melihat bahwa pernikahan seperti banyak institusi sosial lainnya, kerap dikuasai oleh struktur patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah.³⁶ Oleh sebab itu, perceraian tidak hanya dipahami sebagai perpisahan antara pasangan, tetapi juga sebagai sarana pembebasan perempuan dari ketidakadilan dalam pernikahan.

Para pemikir teologi feminis menolak pemahaman tradisional terhadap teks-teks suci yang melarang perceraian tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan pengalaman perempuan. Misalnya, ayat-ayat dalam Alkitab atau kitab suci lainnya yang menegaskan pernikahan sebagai ikatan yang tidak boleh diputus sering kali digunakan untuk menekan perempuan agar tetap bertahan dalam hubungan yang merugikan mereka. Elisabeth Schussler Fiorenza dan teolog feminis lainnya berpendapat bahwa pendekatan semacam itu harus dikaji ulang agar lebih berorientasi pada prinsip keadilan

³⁵Ibid, hlm 38.

³⁶Budi Tri Santosa Mutiara Herrinda Firdausi, "Eat, Pray, Love ; Feminisme Perceraian Perempuan New York" 4 (2021).

dan kesetaraan, sehingga perempuan dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan mereka.³⁷

Dalam perspektif teologi feminis, perceraian kerap dipandang sebagai langkah penting menuju kebebasan. Mary Daly, misalnya, mengemukakan pandangan radikal bahwa perempuan perlu melepaskan diri dari belenggu patriarki, termasuk dalam konteks pernikahan. Baginya, perceraian bisa menjadi sebuah jalan bagi perempuan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri, tanpa terikat oleh norma-norma sosial yang membatasi kebebasan mereka. Selain itu, perceraian juga dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali terjadi secara sistematis. Isu perceraian dalam teologi feminis juga berfokus pada kasus-kasus di mana perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Banyak perempuan tetap terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan karena adanya tekanan sosial dan ajaran agama yang menuntut mereka untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi menjaga "*kesakralan*" pernikahan. Dalam konteks ini, perceraian dianggap sebagai pilihan yang perlu diambil demi melindungi diri sendiri dan anak-anak dari bahaya. Para teolog feminis menegaskan bahwa ajaran agama seharusnya tidak digunakan untuk membatasi hak perempuan, melainkan

³⁷Sitorus and Sidauruk, "Perceraian Dalam Pandangan Kristiani. hlm 25-28"

harus menjadi alat yang mendukung keputusan mereka untuk keluar dari situasi yang merugikan.³⁸

D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Menurut Teologi Feminis

Kehidupan rumah tangga yang telah dibangun dan menjalani kehidupan yang harmonis tetapi berakhir dengan perceraian, tentu memiliki sebab dan akibat sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Seperti yang akan diuraikan melalui perspektif teologi feminis bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk bercerai, yaitu:

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan sering dianggap sebagai faktor utama yang memicu perceraian. Dalam berbagai tradisi, termasuk teologi feminis, tindakan ini dipandang sebagai pengkhianatan terhadap ikatan pernikahan. Selain mencerminkan ketidakseimbangan dalam hubungan, perselingkuhan juga dapat menunjukkan ketidakadilan struktural, di mana perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan akibat norma patriarkal yang membiarkan atau bahkan membenarkan perilaku tersebut.³⁹

³⁸Dessy Kristiyani, "Kajian Teologi Feminis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Istri Yang Mandul Setelah Dibelis Dalam Suku Rote Ndao" (Universitas Kristiani Satya Wacana Salatiga, 2020), Hlm 1-4.

³⁹Marlina Paraibabo, "Kajian Etis Teologis Kristiani Tentang Perceraian Dalam Keluarga Kristiani," *Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 2 (2021): 392.

2. Faktor Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi kerap memicu perceraian, terutama saat terjadi ketimpangan pendapatan antara pasangan. Dalam teologi feminis, ketidaksetaraan finansial dipandang memperburuk dinamika kekuasaan dalam pernikahan, di mana perempuan yang mandiri secara ekonomi lebih berani mengakhiri hubungan yang tidak harmonis.⁴⁰

3. Tidak Mempunyai Keturunan

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya memiliki harapan besar yaitu bahwa mempunyai keturunan. Tetapi sering kali dijumpai ada beberapa pasangan yang tidak bisa mempunyai keturunan, sehingga kadang kala masalah tersebut menjadi pemicu terjadinya perceraian, sebab tidak menemukan solusinya. Dalam teologi feminis, banyak budaya khususnya yang masih menganut sistem patriarki (termasuk sebagian komunitas Kristiani), beban untuk memiliki anak sering kali diletakkan sepenuhnya di pundak perempuan. Jika suatu pernikahan tidak menghasilkan keturunan, perempuan biasanya yang lebih dulu disalahkan dan bahkan dijadikan alasan utama untuk perceraian.⁴¹ Padahal, masalah infertilitas tidak hanya berasal dari pihak perempuan, melainkan bisa juga disebabkan oleh laki-laki.

⁴⁰Ibid, hlm 392.

⁴¹Ibid, hlm 393.

4. Ketidak Cocokan

Ketidak harmonisan dalam pernikahan kerap menjadi pemicu perceraian. Dari perspektif teologi feminis, perbedaan dalam nilai serta ekspektasi antara suami dan istri dapat memicu konflik yang mendalam. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif memperburuk keadaan, sebab ketika pasangan gagal menyampaikan perasaan dan pemikiran dengan jelas, kesalahpahaman serta kekecewaanpun semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.⁴²

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindakan kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun emosional, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian. Dalam banyak kasus, perempuan merupakan pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.⁴³ Perspektif teologi feminis menilai bahwa segala bentuk kekerasan domestik bertentangan dengan prinsip kasih Allah yang menjunjung tinggi martabat dan kemanusiaan. Tindakan kekerasan bukanlah cara untuk mendidik atau memperbaiki, melainkan merupakan bentuk penindasan yang merendahkan nilai dan martabat kemanusiaan, terutama terhadap perempuan.

⁴²Ibid, hlm 393.

⁴³Maysieta Onibala, "Kajian Teologis Perkataan Yesus Tentang Perceraian Menurut Matius 19:1-12 Dan Implementasinya Bagi Masyarakat Desa Tolok Kecamatan Tompaso," *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 2, no. 1 (2021): 6.

6. Status Sosial

Pernikahan antara kasta kerap menimbulkan ketimpangan dalam relasi kekuasaan. Perempuan yang berasal dari kasta lebih rendah (*seperti Tana' Karurung atau Kua-Kua*) dan menikah dengan pria dari kasta lebih tinggi cenderung mengalami penempatan posisi yang tidak setara, baik dalam pengambilan keputusan domestik maupun dalam hal akses terhadap ekonomi keluarga. Ketidakseimbangan ini sering kali menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian, apalagi jika pihak laki-laki memanfaatkan status sosialnya untuk mendominasi atau meninggalkan pasangannya.⁴⁴ Dari sudut pandang teologi feminis, perceraian yang dipicu oleh perbedaan status sosial dalam masyarakat Toraja dipandang sebagai wujud nyata dari ketidakadilan yang bersumber pada struktur sosial patriarkal.

Oleh sebab itu secara keseluruhan, perspektif teologi feminis mengenai perceraian menekankan pentingnya menempatkan pengalaman perempuan sebagai pusat dalam diskusi teologis. Perceraian tidak hanya dianggap sebagai kegagalan dalam hubungan, tetapi juga sebagai peluang bagi perempuan untuk membangun kehidupan yang

⁴⁴Hermince Sakke', Jolly Ken Pongoh, and Olga A. Pangkerego, "Akibat Hukum Perkawinan Adat Toraja Terhadap Hak Waris Perempuan," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024).

lebih bermartabat dan terbebas dari penindasan.⁴⁵ Teologi feminis berupaya menafsirkan kembali ajaran agama agar lebih inklusif dan mendukung hak perempuan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa tekanan patriarkal atau stigma sosial.

⁴⁵Citra Eka Pratiwi, "Teologi Feminis Perspektif Ali Syari'Ati" (Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm 22.